

jurnal sapta+luna

by Lunariana Lubis

Submission date: 11-Sep-2020 02:06PM (UTC+0900)

Submission ID: 1350619457

File name: jurnal_sapta_luna_1.docx (54.13K)

Word count: 1794

Character count: 12483

1
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR (SPB) ONLINE DI KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG
PERAK SURABAYA**

Nurul Sapta Widodo¹, Lunariana Lubis², Yuliansyah³

- (1) Dosen Program Diploma Pelayaran Universitas Hang Tuah Surabaya,
nurul.sapta@hangtuah.ac.id
- (2) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik
Universitas Hang Tuah Surabaya, lunariana.lubis@hangtuah.ac.id
- (3) Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hang Tuah Surabaya, yuliansyah.haroni@gmail.com

Abstrak

1
Surat Peretujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang akan keluar masuk pelabuhan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SPB *online* di Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya. Penelitian ini dilakukan di Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya melalui wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh bahwa Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah mengimplementasikan kebijakan penerbitan SPB *online* dengan baik namun masih terdapat kekurangan yaitu pada kuantitas sumber daya manusia di Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya dan belum ada sistem yang terintegrasi antar *stakeholder* yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap.

1
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penerbitan Surat Peretujuan Berlayar

Latar Belakang

Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan bagian dari konektivitas dengan pelabuhan lainnya, baik dalam kegiatan perdagangan antarpulau, pergerakan penumpang maupun ekspor impor intensitasnya semakin tinggi. Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan kelas satu di Indonesia harus berbenah dalam rangka menunjang seluruh aktivitas transportasi laut yang posisinya berada di antara wilayah barat dan timur Indonesia. Posisi inilah yang menyebabkan lalu lintas kapal yang keluar dan masuk Pelabuhan Tanjung Perak sangat tinggi (Syarifuddin, Al Musadieq, & Yulianto, 2016). Hal ini dibuktikan dari data jumlah kapal baik yang masuk dan keluar Pelabuhan Tanjung Perak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah kapal yang memasuki Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2017 sebanyak 9345 kapal, pada tahun 2018 sebanyak 11972 kapal, pada tahun 2019 sebanyak 13549 kapal. Sedangkan jumlah kapal yang keluar Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2017 sebanyak 9985 kapal, pada tahun 2018 sebanyak 12137 kapal, pada tahun 2019 sebanyak 13267 kapal (Sumber : Kesyahbandaran UtamaTanjung Perak Surabaya, 2020).

Setiap kapal yang akan berlayar untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang atau penumpang baik yang masuk ataupun keluar pelabuhan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar. Penerbitan SPB merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. SPB yang saat ini diterbitkan oleh Syahbandar sudah dalam bentuk elektronik.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *online* adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik terhadap setiap kapal yang akan berlayar dan merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar. Untuk mendapatkan SPB, maka perusahaan pelayaran mengajukan permohonan secara *online* kepada Syahbandar dengan melampirkan dokumen melalui *Inaportnet System SPS*. *Inaportnet System* merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan/BUP). Pihak yang terlibat dalam sistem ini antara lain Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran, Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar muat, dan Jasa Pengurusan Transportasi. *Inaportnet System* dipergunakan untuk mengintegrasikan semua aplikasi perijinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/Ditjen Hubla (Malisan & Tresnawati, 2019).

Dasar hukum penerbitan SPB secara *online* diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 tahun 2015 tentang Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar Syahbandar Secara *Online*. Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Syahbandar sebagai Pejabat Pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Indonesia, 2015). SPB yang diterbitkan oleh Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak secara online sejak 28 September 2017. SPB diterbitkan secara *online* bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Dahulu bukti-bukti pembayaran, dokumen-dokumen yang ada diserahkan langsung ke Syahbandar (Putra, 2014) tetapi sekarang dengan adanya sistem ini maka perusahaan pelayaran cukup mengunggah

data-data yang diperlukan secara *online*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *online* di Syahbandar Utama Tanjung Perak Surabaya”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena peneliti ingin mendapatkan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari suatu kasus (Rahmat, 2009). Dalam penelitian kualitatif kualitas riset bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara kepada informan kunci yaitu Syahbandar Tanjung Perak, observasi yaitu mengamati dan mencatat secara langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan dan dokumentasi yang berupa catatan administrasi, surat-menyurat dan dokumen lainnya yang relevan. Trianggulasi digunakan untuk mendapatkan validitas dan realibilitas pada penelitian kualitatif dimana lebih dari satu metode pengumpulan data (wawancara, observasi dan dokumentasi) dan melakukan interview dari bawahan sampai atasan dan menginterpretasikan temuan dengan pihak lain (Chariri, 2009). Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman, 2014 (Natalia, 2017) yaitu (1) pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, (2) reduksi data yang dilakukan dengan memilah data di lapangan yang relevan pada permasalahan dan dilakukan berulang selama proses penelitian berlangsung, (3) penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum dan (4) penarikan kesimpulan dilakukan setelah data direduksi dan disajikan yang berisi jawaban dari rumusan masalah.

Landasan Teori

Implementasi suatu kebijakan merupakan tahapan dari pembuatan kebijakan antara pembentukan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan baik demikian pula sebaliknya jika suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Hasibuan, 2014).

Pendapat Van Meter dan Van Horn menyatakan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut meliputi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, 2010). Implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja yaitu (1) ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan program yang telah direncanakan, (2) sumber kebijakan merupakan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, (3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor berupa tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya, (4) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, jika semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi demikian pula sebaliknya, (5) sikap para pelaksana dimana setiap badan /instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan faktor yang juga menentukan keberhasilan suatu implementasi (Tarigan, 2008).

Analisa

Analisa data hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *online* di Syahbandar Tanjung Perak Surabaya dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah :

Tabel 1. Analisa berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn.

Indikator	Sub Indikator	Analisa
Standard dan sasaran Kebijakan	Peraturan Menteri dan SOP	Penerbitan SPB <i>online</i> sudah dijalankan oleh Syanhbandar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 tahun 2015 dan SOP/KP.TBL/01 tanggal 15 Januari 2020. Syahbandar menerbitkan SPB 1 jam sebelum kapal berangkat dengan masa berlaku 24 jam setelah diterbitkan sebelum kapal berlayar dengan ketentuan yang

		telah ditentukan.
Sumber kebijakan	Sumber Daya Manusia	Kuantitas SDM di Kesyahbandaran tidak diatur secara spesifik di aturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga tiap UPT (Unit Pelaksana Teknis) berbeda-beda jumlah SDM untuk tiap unitnya. Kualitas SDM yang dimiliki oleh Kesyahbandaran sudah cukup dan telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
	Sumber Daya Keuangan	Dikarenakan sistem online maka pembayaran dilaksanakan melalui <i>Inaportnet System</i> dibagian sistem layanan terpadu (Simpadu).
	Sistem Teknologi Informasi	<i>Inaportnet System</i> telah digunakan oleh Kesyahbandaran untuk berbagai macam kebutuhan yaitu Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK), Pengelasan, Surat Perintah Kerja (SPK) Pandu, Pengawasan Barang berbahaya dan sebagainya yang berkaitan dengan pelayanan di pelabuhan.
Sikap/kecenderungan pelaksana kebijakan	Proses komunikasi	Sosialisasi tata cara Penerbitan SPB oleh Kesyahbandaran telah dilakukan dalam bentuk penerbitan surat edaran, <i>website</i> dan <i>flow chart</i> . Sedangkan penyuluhan dan pembinaan telah dilakukan kepada perusahaan pelayaran dalam bentuk bimtek <i>Inaportnet System</i> terakhir dilakukan pada bulan November 2019.
Karakteristik organisasi	Struktur organisasi	Berdasarkan PM 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama menjelaskan bahwa Penerbitan SPB dibawah kepala seksi Tertib Berlayar di bidang Keselamatan Berlayar.
Komunikasi	Tingkat kejelasan	Pengguna jasa/perusahaan pelayaran telah menggunakan <i>Inaportnet System</i> dengan benar yang ditandai dengan jarang terjadinya kesalahan dalam menggunggah data maupun mengurangi kesalahan pembayaran PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak)
Kondisi lingkungan	Kondisi sosial,	Belum terintegrasinya sistem dengan

	ekonomi, dan politik	<i>stakeholder</i> lainnya di pelabuhan terkait pelayanan bersama <i>Single Windows</i> .
--	----------------------	---

Sumber: diolah peneliti, 2020

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan penerbitan SPB *online* di Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan yaitu pada kuantitas sumber daya manusia di Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak dan belum adanya integrasi sistem dari *external stakeholder* lainnya yang ada di pelabuhan terkait pelayanan satu atap.

DAFTAR PUSTAKA

- 5
Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1–27.
- Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, M. H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERPADU (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 962–971.
- Hasibuan, D. K. (2014). Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat yang Berada di Koperasi Samudra Sejahtera (KOMURA) Pelabuhan Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(6), 1742–1752.
- Indonesia, M. P. R. (2015). *PM_154_Tahun_2015.pdf*.
- Malisan, J., & Tresnawati, W. (2019). Implementasi Inaportnet dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Warta Penelitian Perhubungan*, 31(2), 67–74. <https://doi.org/10.25104/warlit.v31i2.1267>
- Natalia, M. (2017). AGENDA SETTING BERITA PEDOFILIA DI SAMARINDA POS. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 283–295.
- Putra, H. W. (2014). Standar Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan (Studi Kasus di Pelabuhan Tenggayu I Tarakan). *EJournal Administrasi Negara*, 3(2), 863–876.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 5(9), 1–8.
- Syarifuddin, M. F., Al Musadieq, M., & Yulianto, E. (2016). Pentingnya Pelabuhan Tanjung Perak Bagi Perekonomian Jawa Timur (Studi pada PT . PELINDO III Tanjung Perak Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 35(1), 172–178.
- Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*.

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.upstegal.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
4	Johny Malisan, Wiwit Tresnawati. "Implementasi Inaportnet dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya", Warta Penelitian Perhubungan, 2019 Publication	3%
5	pt.scribd.com Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 50 words